

BAB IV

PERAN AIFS (*ASEAN INTEGRATED FOOD SECURITY*) DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN REGIONAL ASEAN

Bab keempat ini memfokuskan perhatiannya mengenai analisa peran AIFS (*ASEAN Integrated Food Security (AIFS)*) sebagai sebuah organisasi internasional di tingkat regional ASEAN yang menjalankan fungsi informasi dan fungsi operasional dalam mewujudkan ketahanan pangan regional ASEAN. Peran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan regional ASEAN guna menjamin ketersediaan bahan pangan khususnya beras baik antar waktu maupun antar tempat serta mewujudkan sistem pemasaran komoditas pangan yang mantap dan stabil di tingkat regional ASEAN. Implementasi peran dan fungsi AIFS tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

A. Fungsi Informasi Melalui Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Terintegrasi

Peningkatan proyek jaringan informasi keamanan pangan terkait dalam database dan situs AIFS dengan website *www.afsis.gov.id*. Pada tahun 2008, proyek dipersiapkan untuk pengembangan Informasi Peringatan Dini (EWI) dan Outlook Komoditas Pertanian yang telah menghasilkan karya-karya sebagai berikut:

1. Ulasan informasi yang ada dalam database *AFSIS (ASEAN Food Security Information System)* ke dalam pengembangan EWI dan ACO.

2. Penyusunan kerangka acuan komite (ACO) dan sirkulasi untuk negara-negara anggota ASEAN untuk mencalonkan orang yang tepat untuk menjadi anggota komite.
3. Mempekerjakan seorang ahli untuk membantu dalam pengembangan EWI dan ACO.
4. Penyusunan pedoman dan format pelaporan bagi negara-negara anggota untuk memberikan informasi yang diperlukan.
5. Studi metodologi yang tepat dalam proses pengembangan sistem keamanan pangan di EWI (*Early Warning System*) dan ACO (*ASEAN Commodity Outlook*).

Tahap pertama proyek pembangunan Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN (AFSIS) dimulai pada 2003 dan berakhir pada tahun 2007. Sebelum berakhirnya Proyek, Pertemuan ketiga Menteri Sektor Kehutanan dan Pertanian ASEAN (AMAF Meeting + 3) menyetujui rencana pelaksanaan proyek tahap kedua yang dilakukan pada bulan November 2007 di Bangkok, Thailand. Proyek AFSIS tahap kedua memiliki jangka waktu 5 tahun yang berlangsung dalam rentang periode 2008-2012. Proyek AFSIS tahap kedua ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan regional dan melanjutkan kegiatan utama tahap 1 dalam meningkatkan sistem informasi ketahanan pangan daerah dan peningkatan kapasitas negara anggota dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Unsur-unsur tambahan, termasuk: informasi peringatan dini, daftar komoditas pertanian dan kerjasama teknis dimasukkan dalam agenda proyek AFSIS tahap kedua. Proyek tersebut dilaksanakan

dibawah kerjasama ASEAN+3 yang dipimpin oleh Thailand, khususnya Kantor Ekonomi Pertanian (OAE), Kementerian Pertanian dan Koperasi. Departemen Statistik (SD), MAFF (*Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries*). Jepang merupakan Negara donor utama yang membiayai pendanaan program AFSIS ASEAN.³⁷

Kegiatan utama Proyek Pembangunan AFSIS Tahap II yang dilaksanakan dari awal tahun 2008 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pertemuan Organisasi Lokal dan Direktur Jenderal Statistik dan Informasi Pertanian dibawah skema Negara-negara ASEAN + 3 negara.
2. Pertemuan lanjutan yang diselenggarakan selama 11-12 Maret 2008 di Tokyo, Jepang. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas pengembangan statistik pertanian dan informasi dalam memperkuat ketahanan pangan regional. Topik diskusi meliputi:
 - a. Peran proyeksi makanan untuk kebijakan keamanan pangan di negara-negara ASEAN.
 - b. Pengembangan system informasi peringatan dini di Thailand.
 - c. Evaluasi Proyek AFSIS Tahap I dan Rencana Pelaksanaan Tahap-2.
 - d. Laporan Proyek JICA (*Japan International Cooperation Agency*)
"Analisis Statistik Pertanian dan Pembangunan Ekonomi di Thailand"

³⁷[http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings and workshops/APCAS23/documents_OCT10/APCAS-10-17_AFSIS.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/APCAS23/documents_OCT10/APCAS-10-17_AFSIS.pdf), accessed April 25th 2013.

3. Pertemuan ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2008 untuk membahas dan mengkaji pelaksanaan proyek tahun 2007, Rencana Kerja Tahunan 2008 dan hal penting lainnya yang relevan dengan pelaksanaan proyek.

4. Pertemuan ke-7 yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 Januari 2009 di Bali, Indonesia. Pertemuan difokuskan pada pelaksanaan proyek tahun 2008, pengembangan proyek lanjutan, kontribusi dari Proyek Kerangka Kerja (*Framework*) ASEAN *Integrated Food Security* (AIFS), diskusi tentang situasi keamanan pangan di Indonesia dan rencana kerja proyek pada tahun 2009 termasuk mengusulkan rencana kerja kegiatan kerjasama teknis.

5. Pengembangan jaringan informasi

Proyek pengembangan jaringan system informasi keamanan dan ketahanan pangan disajikan dalam database dan website AFSIS, yang pada tahun 2008 dipersiapkan untuk pengembangan Informasi Peringatan Dini (EWI) dan Daftar Komoditas Pertanian yang berisikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Informasi yang ada dalam database AFSIS untuk validitas pengembangan system informasi peringatan dini dan daftar komoditas pertanian.

b. Penyusunan komite kerangka acuan dan sirkulasi ke negara-negara anggota ASEAN bagi mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi anggota komite.

- c. Mempekerjakan seorang ahli untuk membantu dalam pengembangan system informasi peringatan dini dan daftar komoditas pertanian.
 - d. Penyusunan pedoman dan format pelaporan bagi negara-negara anggota untuk memberikan informasi yang diperlukan.
 - e. Studi metodologi yang tepat dan proses dalam system informasi peringatan dini dan catalog komoditas pertanian.
6. Pengembangan sumber daya manusia
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia selama 2008-2009 dapat diringkas sebagai berikut menunjukkan:
- a. Program pelatihan proyek organisasi yang diselenggarakan dalam tujuh kursus pelatihan di Thailand, Cina, Korea dan Jepang. Kursus yang diselenggarakan di Thailand dan Jepang dibiayai oleh Dana Proyek Bersama, sementara kursus di Cina dan Korea yang disponsori oleh negara tuan rumah.
 - b. Kursus Pelatihan "Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN": Kursus ini diselenggarakan selama 27-31 Oktober 2008 di Shanghai, China. Kursus ini difokuskan pada diskusi dan pertukaran pandangan antara peserta dan staf lokal di berbagai instansi yang bertanggung jawab untuk pengembangan sistem informasi pertanian. Ini juga termasuk kunjungan lapangan untuk memungkinkan peserta untuk mengamati kegiatan yang menarik di daerah.
 - c. Kursus Pelatihan "Pengumpulan Statistik Data, Analisis & Diseminasi Informasi Pertanian". Kursus ini diselenggarakan selama 6-21

November 2008 di Seoul, Korea. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan staf dalam analisis statistik pertanian dan sistem informasi manajemen keamanan pangan. Ada 18 peserta dalam kursus ini.

- d. Kursus Pelatihan "Teknik Peramalan dan Pengembangan Komoditas Pertanian". Kursus ini diselenggarakan di Thailand pada tanggal 10-20 Desember 2008. Kursus ini termasuk sesi teoritis dan praktis untuk memungkinkan peserta untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk persiapan Sistem Informasi Peringatan Dini dan Daftar Komoditas Pertanian.
- e. Kursus Pelatihan "Pengetahuan Dasar dan Teknik Perencanaan Statistik Pertanian Perencanaan": Kursus ini diselenggarakan di Fuji, Jepang selama 18-25 Juni 2009. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam statistik pertanian personil muda di negara-negara anggota. Ada 22 peserta dalam kursus ini.

B. Fungsi Operasional Melalui Kerjasama yang Berbasis Kemitraan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Regional ASEAN

1. Rumusan Kerangka Kerja AIFS

Relevan dengan badan sektoral ASEAN, AIFS akan mengkoordinasikan pelaksanaan Kerangka Kerja Ketahanan Pangan. Sementara, instansi pemerintah terkait akan bertanggung jawab untuk

mengawasipersiapan dan pelaksanaan tindakan lebih rinci di tingkat nasional.Kemitraan dan kerjasama pengaturan dengan organisasi internasional, lembaga donor, sektor swasta, asosiasi industri dan masyarakat luas di tingkat nasional dan regional juga diperlukan untuk memastikan partisipasi dari semuapemangku kepentingan dalam proses implementasi.Untuk keberhasilan pelaksanaan kerangka kerja AIFS, diperlukan mekanisme kelembagaan, sumber daya, kapasitas dan politik dalam proses pelaksanaan kerja.³⁸

Para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) telah melakukan upaya koordinasi dengan lembaga sektoral ASEAN yang terkait dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan keseluruhan kerangka kerja AIFS dan melakukan pemantauan komitmen yang berada di lingkungnya masing-masing.Untuk memungkinkan efektifitas pelaksanaan kerangka kerja AIFS, kemitraandan perjanjian kerjasama dengan organisasi internasional dan lembaga donor yaitu FAO,Bank Dunia, IRRI (*International Rice Research Institute*), IFAD (*International Fund for Agricultural Development*), ADB (*Asian Development Bank*) harus dipromosikan.Kemajuan dalam pelaksanaan kerangka kerja AIFS perlu dipantau, ditinjau dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan yang relevan setiap tahunnya.Sekretariat ASEAN harus mengkaji dan memantau kepatuhan pelaksanaan kerangka kerja AIFS tersebut.³⁹

³⁸ <http://cil.nus.edu.sg/tp/pdf/20Food%20/ ACTION PROGRAMMES/ ACTIVITIES>, accessed 24 Desember 2012

³⁹ *Loc. cit.*, accessed 24 Desember 2012.

Kerangka kerja lintas sektoral ASEAN dalam mengatasi masalah perubahan iklim dan ketahanan pangan merupakan suatu kerangka terpadu yang akan memfasilitasi ASEAN dalam menanggapi ancaman global perubahan iklim dan ketahanan pangan. Kerangka kerja ini meliputi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menuju Ketahanan Pangan. Upaya memfokuskan pada 3 sektor utama dalam kerangka kerja AIFS menjadi media ASEAN untuk lebih mengkoordinasikan dukungan dari mitra-mitranya. Tujuan keseluruhan dari kerangka kerja lintas sektoral tersebut untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan melalui pemanfaatan berkelanjutan, efisiensi dan efektifitas dari sumber daya tanah, hutan, dan air dengan meminimalkan risiko dan dampak terhadap perubahan iklim.

Untuk mencapai tujuannya, kegiatan-kegiatan rinci akan diidentifikasi dan dilaksanakan dengan mengacu pada dua tujuan utama, yaitu: (1) koordinasi pengembangan adaptasi dan strategi mitigasi serta (2) kerjasama pelaksanaan adaptasi terpadu dan langkah-langkah mitigasi. Tiga sektor utama kerangka kerja AIFS tersebut berhubungan erat dengan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan.⁴⁰ Kerangka kerja AIFS sebagai usaha bersama untuk menjaga semua pemangku kepentingan mengenai kemajuan pelaksanaan kerangka kerja tersebut dan menghindari

⁴⁰*Loc. cit.*, accessed December 24th 2012.

kebingungan dan kesalahpahaman tentang status ketahanan pangan di wilayah tersebut.⁴¹

Kerangka *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* didukung oleh Rencana Strategis Aksi Ketahanan Pangan (SPA-FS), yang mencakup periode lima tahun 2009-2013. Konsultasi dengan pihak terkait/stakeholder di tingkat regional dan nasional harus dilakukan untuk mendapatkan masukan yang relevan untuk memastikan konsistensi rumusan strategis, dan program aksi/kegiatan serta mempromosikan rasa kepemilikan yang lebih besar pada AIFS.⁴²

Kerangka kerja AIFS dalam mewujudkan ketahanan pangan meliputi beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:⁴³

- a. Pertemuan Tingkat Direktorat Jenderal Pertanian, Statistik dan Informasi negara-negara anggota ASEAN ditambah dengan Jepang, Korea Selatan dan China;
- b. Pertemuan Tingkat Kementerian Pertanian ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2008 untuk membahas dan mengkaji pelaksanaan proyek tahun 2007, rencana kerja tahunan 2008 dan hal penting lainnya yang relevan dengan pelaksanaan proyek;
- c. Pertemuan Tingkat Kementerian Pertanian ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 20 - 22 Januari 2009 di Bali, Indonesia;

⁴¹*Loc. cit.*, accessed December 24th2012.

⁴²*Loc. cit.*, accessed December 24th2012.

⁴³*Loc. cit.*, accessed December 24th2012.

- d. Pengembangan Jaringan Informasi keamanan pangan terkait dalam database dan situs AIFS;
- e. Pengembangan sumber daya manusia;
- f. Kerjasama teknis antar negara anggota ASEAN.

Aspek yang tak kalah pentingnya menyangkut keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam kerangka kerja AIFS dalam mewujudkan ketahanan pangan bersama regional ASEAN adalah dukungan pendanaan. Sumber daya keuangan merupakan pengatur dasar untuk mendukung pelaksanaan kerangka kerja AIFS dengan mekanisme sharing biaya di antara negara anggota ASEAN. Dukungan keuangan tambahan diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan khusus yang bersumber dari mitra dialog, organisasi internasional dan lembaga donor. Penelitian dan pengembangan kapasitas AIFS akan dimobilisasi dari berbagai fasilitas seperti *ASEAN Development Fund*, Yayasan ASEAN, dan lembaga donor lainnya.⁴⁴

2. Implementasi Kerangka Kerja AIFS

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerangka kerja AIFS selama kurun waktu lima tahun sejak 2007 – 2012, diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/APCAS23/documents_OCT10/APCAS-10-17_AFSIS.pdf, accessed December 24th 2012

⁴⁵*Loc. cit.*, accessed December 24th 2012.

- a. Pertemuan Tingkat Direktorat Jenderal Pertanian, Statistik dan Informasi negara-negara anggota ASEAN + 3 (Jepang, Korea Selatan dan China)

Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 11 - 12 Maret 2008 di Tokyo, Jepang. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas pengembangan statistik dan informasi pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Topik diskusi meliputi:

- 1) Peran proyeksi makanan untuk kebijakan ketahanan pangan di Negara ASEAN;
- 2) Pembangunan Sistem Informasi dan Peringatan Dini di Thailand;
- 3) Evaluasi proyek kerangka kerja fase 1 dan rencana pelaksanaan tahap ke-2;
- 4) Laporan Statistik Proyek JICA mengenai "Pertanian dan Analisis Pembangunan Ekonomi di Thailand"

- b. Pertemuan Tingkat Kementerian Pertanian ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2008

Pertemuan ini dilaksanakan dengan agenda pembahasan dan pengkajian mengenai pelaksanaan proyek tahun 2007, rencana kerja tahunan 2008 dan hal penting lainnya yang relevan dengan pelaksanaan proyek.

- c. Pertemuan Tingkat Kementerian Pertanian ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 20 - 22 Januari 2009 di Bali, Indonesia.

Pertemuan difokuskan pada pelaksanaan proyek tahun 2008, pengembangan ACO, kontribusi proyek ke *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS), diskusi pada situasi keamanan pangan di Indonesia dan rencana kerja proyek di tahun 2009, termasuk rencana kerja yang diusulkan untuk kegiatan kerjasama teknis.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia selama 2008-2009 diimplementasikan melalui penyelenggaraan tujuh kursus pelatihan yang berpusat di Thailand untuk mengembangkan Pelatihan Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN (AFSIT) yang terintegrasi dengan Cina, Korea dan Jepang sebagai mitra utama ASEAN (ASEAN +3). Kursus diselenggarakan di Thailand dan Jepang yang dibiayai oleh oleh negara tuan rumah. Umumnya, dua peserta dari masing-masing Negara Anggota diundang untuk menghadiri setiap kursus pelatihan. Daftar Pelatihan yang diselenggarakan dibawah Proyek disajikan sebagai berikut:

- a. Pelatihan kursus "Sistem Informasi Keamanan Pangan ASEAN":
Kursus ini diselenggarakan pada tanggal 27 - 31 Oktober 2008, di Shanghai, China. Kursus difokuskan pada diskusi dan pertukaran pandangan di antara para peserta dan staf lokal di berbagai instansi yang bertanggung jawab untuk pengembangan sistem informasi pertanian. Ini juga termasuk kunjungan lapangan untuk memungkinkan

peserta untuk mengamati kegiatan pertanian di daerah. Kursus ini diikuti 10 peserta perwakilan negara anggota ASEAN+3.

- b. Pelatihan kursus "Pengumpulan Data Statistik Pertanian, Analisis dan Penyebaran Informasi ": Kursus ini diselenggarakan pada tanggal 6 – 21 November 2008 di Seoul, Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan staf dalam analisis statistik pertanian dan manajemen sistem informasi keamanan pangan. Kursus ini diikuti oleh 18 peserta perwakilan negara anggota ASEAN+3.
- c. Pelatihan kursus "Teknik Peramalan dan Pengembangan Outlook Komoditi Pertanian ": Kursus diselenggarakan di Thailand pada tanggal 10 - 20 Desember 2008. Kursus ini mencakup sesi teori dan praktis untuk memungkinkan peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun laporan EWI dan ACO Laporan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Proyek. Kursus ini diikuti oleh 15 peserta perwakilan negara anggota ASEAN+3.
- d. Pelatihan kursus "Pengetahuan Dasar dan Teknik Statistik Pertanian Perencanaan": Kursus diselenggarakan di Pusat Pengembangan Manajemen Fuji, Jepang yang diselenggarakan pada tanggal 18 - 25 Juni 2009. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga muda dalam statistik pertanian di negara-negara anggota. Kursus ini diikuti oleh 22 peserta perwakilan negara-negara anggota ASEAN.

- e. Pelatihan kursus "Sistem Informasi Keamanan Pangan ASEAN". Kursus ini diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 30 Juli - 14 Agustus 2009. Tujuannya adalah untuk bertukar pandangan, pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan pengembangan sistem informasi ketahanan pangan antar personel di negara-negara anggota ASEAN. Kursus ini diikuti oleh 17 peserta perwakilan negara-negara anggota ASEAN.
- f. Pelatihan kursus "Sistem Informasi Keamanan Pangan ASEAN" yang diselenggarakan di China pada tanggal 8 - 19 September 2009. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem informasi pertanian dan kapasitas staf terkait di negara-negara anggota ASEAN. Kursus ini diikuti oleh 22 peserta perwakilan negara-negara anggota ASEAN.
- g. Pelatihan kursus "Pengembangan Informasi Produksi Pertanian" yang diselenggarakan di Bangkok Thailand pada tanggal 26 November - 4 Desember 2009. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengembangkan kemampuan informasi yang berkaitan dengan produksi pertanian yang akan digunakan untuk perencanaan program ketahanan pangan. Kursus ini diikuti oleh 20 peserta perwakilan negara-negara anggota ASEAN.

4. Kerjasama Teknis antar Negara Anggota ASEAN

Kerjasama teknis antar negara anggota ASEAN yang dimulai pada tahun 2008, yang ditandai dengan kerjasama teknis bersama dengan melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi kebutuhan dan potensi masing-masing negara anggota ASEAN mengenai pengembangan sistem informasi ketahanan pangan melalui instrument kuesioner.
- b. Lokakarya organisasi untuk menyesuaikan pasangan negara yang menjadi mitra teknis kerjasama dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing negara.
- c. Koordinasi untuk mengatur jadwal kegiatan untuk setiap pasangan negara dalam menerapkan kerjasama teknis dibidang pengembangan sistem informasi pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan regional ASEAN.

Implementasi keenam program dan kegiatan yang tercakup dalam kerangka kerja AIFS diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ketahanan pangan pada ketiga sektor utama AIFS, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam menghadapi gejolak perubahan iklim dan lingkungan global.

5. Program Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan ASEAN 2020

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwasannya fokus kerangka kerja AIFS menitikberatkan pada 3 sektor utama, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan regional ASEAN sebagai solusi bersama untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan lingkungan global yang

berdampak pada ketersediaan sektor pangan bagi masyarakat kawasan ASEAN. Ketiga sektor utama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sektor pertanian dan kehutanan berkelanjutan

Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan ketahanan pangan regional ASEAN melalui pembangunan sektor pertanian dan kehutanan berkelanjutan ditandai dengan berdirinya *ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF)*. Forum bersama ini sebagai bagian dari kerangka kerja AIFS dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan regional ASEAN sebagai respons terjadinya perubahan iklim dan lingkungan global.⁴⁶

Kerjasama ASEAN di sektor pertanian mulai dirintis pada tahun 1968, dengan menjalin kerja sama di bidang produksi dan pasokan pangan. Selanjutnya, pada tahun 1977, ruang lingkup kerjasama diperluas dengan memasukkan wilayah yang lebih luas meliputi sektor pertanian dan kehutanan sebagai respons terjadinya peningkatan kebutuhan sektor pangan. Saat ini, kerjasama regional ASEAN sektor pangan, pertanian dan kehutanan meliputi ketahanan pangan, penanganan makanan, tanaman, peternakan, perikanan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, koperasi pertanian, kehutanan dan kerjasama di bidang pertanian dan hutan, serta skema promosi produk pangan.⁴⁷

Tujuan utama dari kerjasama ASEAN sektor makanan, pertanian dan kehutanan adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan

⁴⁶<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-ministerial-meeting-on-agriculture-and-forestry-amaf>, diakses 30 Januari 2013.

⁴⁷*Loc. cit.*, 30 Januari 2013.

kerjasama regional dalam meningkatkan daya saing internasional produk makanan, pertanian dan kehutanan serta lebih memperkuat pengaturan keamanan pangan regional ASEAN dan posisi bersama di forum internasional.

Sejalan dengan rekomendasi dan hasil yang dicapai dalam KTT ke-IV ASEAN pada tahun 1992 untuk memperkuat kerjasama regional dalam bidang pengembangan, produksi, dan promosi produk pertanian, para Menteri ASEAN yang membidangi masalah Pertanian dan Kehutanan (AMAF) mengidentifikasi tujuh bidang prioritas sebagaimana tercermin dalam Kesepahaman Bersama (MoU) Kerjasama ASEAN dalam Makanan, Pertanian, dan Kehutanan yang ditandatangani pada bulan Oktober 1993 di Bandar Seri Begawan. MoU bertindak sebagai payung kerjasama ASEAN dalam makanan, pertanian dan kehutanan, meliputi:

- 1) Memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut;
- 2) Fasilitasi dan promosi perdagangan intradan ekstra-ASEAN dalam produk pertanian dan kehutanan;
- 3) Generasi dan transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan agribisnis;
- 4) Pertanian pedesaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- 5) Keterlibatan sektor swasta dan investasi;

- 6) Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, dan;
- 7) Memperkuat kerjasama ASEAN dan pendekatan bersama dalam menangani isu-isu internasional dan regional.

Untuk sektor kehutanan ASEAN, dirumuskan lima strategis kerjasama, yaitu:

- 1) Pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
- 2) Memperkuat kerjasama ASEAN dan pendekatan bersama dalam menangani masalah kehutanan skala regional dan internasional;
- 3) Promosi perdagangan intradan ekstraASEAN dalam produk hutan dan partisipasi sektor swasta;
- 4) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan hasil hutan;
- 5) Peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia.

Sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga pangan internasional yang cukup tajam pada tahun 2007/2008, para pemimpin berjanji untuk menjadikan isu ketahanan pangan sebagai masalah prioritas kebijakan permanen dalam skala tertinggi dan mengadopsi Konsensus Ketahanan Pangan di Wilayah ASEAN, antara lain: melaksanakan Kerangka Kerja ASEAN *Integrated Food Security* (AIFS) dan Rencana Strategis Aksi Ketahanan Pangan di Wilayah ASEAN (SPA-FS)2009 – 2013.⁴⁸

⁴⁸ *Loc. cit.*, 30 Januari 2013.

SOM-AMAF adalah badan utama ASEAN yang membidangi kerjasama ASEAN secara keseluruhan sektor makanan dan pertanian, dengan bimbingan para Menteri Pertanian dan Kehutanan negara-negara anggota ASEAN (AMAF). Kelompok kerja sektoral/gabungan komite/dewan, dan para ahli kelompok telah dibentuk untuk melaksanakan kerjasama pada masing-masing sektor makanan dan berbagai sub-sektor pertanian dan kehutanan, serta dalam promosi perdagangan pertanian dan hasil hutan. Terkait dengan mekanisme kerjasama ini, Sekretariat ASEAN bertindak sebagai koordinator utama dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam semua aspek untuk memastikan keberhasilan program kerjasama dan proyek yang bekerja sama dengan kelompok kerja sektoral, nasional dan instansi terkait.

ASEAN telah mengimplementasikan proyek kerjasama banyak di sektor makanan, pertanian dan kehutanan, yang mencakup spektrum yang luas dari kegiatan mulai dari pertukaran informasi, produksi tanaman, pasca panen dan penanganan, pelatihan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta promosi perdagangan di bidang tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan.⁴⁹

Dalam rangka untuk merespon globalisasi perdagangan, kerjasama ASEAN dalam makanan, pertanian dan kehutanan kini lebih difokuskan pada peningkatan daya saing produk pangan, pertanian dan

⁴⁹ *Loc. cit.*, 30 Januari 2013.

kehutanan di pasar internasional, dengan tetap mempertahankan produksi pertanian. Harmonisasi kualitas dan standarjaminan keamanan pangan, dan standarisasi sertifikasi perdagangan antar prioritas yang ditangani, yang didasarkan atas pengalaman dari beberapa negara anggota dan standar internasional yang ada.⁵⁰

b. Sektor perikanan berkelanjutan

Menjelang 2020, kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah yang memilikitanggung jawab dibidang perikanan dan masalah terkaitmenjadi sesuatu hal yang bersifat mendesak untk segera diwujudkan dalam rangka harmonisasi kebijakan, rencana, dankegiatan yang mendukung perikanan berkelanjutan, keamanan pangan dan keselamatan di tingkat nasional dan regionaltingkat. Pejabat Senior mengadopsi Rencana Aksi Perikanan Berkelanjutan untukKetahanan Pangan Kawasan ASEAN Menuju 2020 yang digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkanprogram, proyek dan kegiatan untuk pelaksanaan program tersebut melalui beberapa tahapan sebagai berikut.⁵¹

1) Perencanaan dan informasi

- a) Memadukan perencanaan tangkapan perikanan di laut, darat dan sub-sektor akuakultur untuk mempromosikan

⁵⁰*Loc. cit.*, 30 Januari 2013.

⁵¹<http://www.asean-cn.org/Item/1151.aspx>, accessed December 25th 2012.

pembangunan berkelanjutan dari sektor perikanan, termasuk panen dan pasca panen di kedua jenis tangkapan perikanan;

- b) Memperkuat kapasitas untuk merencanakan perikanan yang berkelanjutan dalam konteks perubahan lingkungan sosial ekonomi dan ekologi melalui mobilisasi data dan informasi *up-to-date* serta menyajikan ringkasan kebijakan yang tepat untuk pengambilan keputusan;
- c) Memperkuat mekanisme statistik nasional untuk budidaya perikanan dan pertukaran data statistik/informasi terkait;
- d) Meningkatkan sistem informasi perikanan regional dan mekanisme untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan penyusunan statistik dan informasi yang diperlukan pada tingkat sub-regional dan regional sebagai standar definisi regional dan klasifikasi untuk data statistik untuk memfasilitasi kompilasi daerah, analisis dan pertukaran data;
- e) Mengkoordinasikan, desentralisasi dan meningkatkan pertukaran informasi/data statistik yang relevan dan informasi dari perikanan yang berhubungan dengan data statistik dan informasi antara perikanan nasional dan pihak berwenang lainnya yang bertanggung jawab untuk keamanan pangan, lingkungan, perdagangan, perikanan, sumber daya air, pertanian/kehutanan, lahan basah, migrasi/pekerjaan dan pembangunan pedesaan;

f) Mengembangkan indikator sederhana dan praktis dalam mendukung perencanaan dan pemantauan perikanan yang berkelanjutan.

2) Manajemen perikanan

Secara teratur dilakukan peninjauan, perbaharuan, dan penguatan kebijakan nasional sektor perikanan, hukum dan kelembagaankerangka kerja melalui konsultasi dan keterlibatan dari instansi pemerintah, sektor swasta, nelayan, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Beberapa aspek yang telah dilakukan terkait dengan manajemen perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan regional ASEAN pada tahun 2020, diantaranya sebagai berikut:⁵²

- a) Mempercepat pengembangan pengelolaan perikanan rencana didasarkan pada ekosistem;
- b) Pendekatan, sebagai dasar untuk konservasi perikanan dan manajemen;
- c) Mengambil langkah-langkah untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal dan menghilangkan penggunaan praktek ilegal dalam penangkapan ikan dengan membangun kesadaran mengenai dampak yang merugikan mereka, memperkuat penegakan hukum, mengembangkan dan mempromosikan alat

⁵²http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/APCAS23/documents_OCT10/APCAS-10-17_AFSIS.pdf, accessed December 25th 2012.

tangkap yang bertanggung dan selektif dalam penggunaannya, menegakkan peraturan dan sarana mendorong mata pencaharian alternatif;

- d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang komprehensif untuk pendekatan ekosistem dalam manajemen perikanan melalui sistem yang efektif (i) untuk memberikan izin untuk ikan (kapal, peralatan, dan orang), (ii) untuk hak penangkapan ikan berbasis hak masyarakat perikanan, (iii) yang menyediakan pengembangan dukungan kerangka hukum dan kelembagaan, (iv) mendorong kerjasama kelembagaan, dan (v) membantu merampingkan co-manajemen;
- e) Mengadopsi co-manajemen di semua tingkat dan dengan semua pihak terkait dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi habitat dan fitur geografis pelindung, serta perumusan kebijakan tentang penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia untuk memastikan bahwa iklim tanggapan perubahan yang diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan perikanan;
- f) Memperkuat kapasitas masyarakat perikanan dan kemampuan organisasi perikanan terkait, LSM, dan sektor swasta untuk lebih menerapkan tindakan yang diperlukan terhadap masyarakat dan organisasi lokal untuk meningkatkan ketahanan, meningkatkan mata pencaharian, mengurangi

- kemiskinan, mengadopsi mata pencaharian alternatif beradaptasi dengan perubahan iklim yang mendukung untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan mendorong partisipasi perempuan dan kelompok-kelompok pemuda dalam proses pembangunan sektor perikanan berkelanjutan;
- g) Meningkatkan dan mempromosikan partisipasi masyarakat lokal, asosiasi perikanan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan perikanan dan co-manajemen. Selain itu, masyarakat harus mengambil bagian dalam perikanan dan penilaian saham dengan menyediakan data, pengetahuan ekologi lokal, dan status dari sediaan tersebut;
- h) Meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk mengembangkan insentif keuangan, khususnya untuk skala kecil pemangku kepentingan dan koperasi, misalnya kredit mikro, dengan kelembagaan nasional dan regional. Bantuan untuk pengembangan perikanan bertanggung jawab perusahaan dan perkembangan kegiatan yang akan mengoptimalkan hasil sosio-ekonomi dan keamanan pangan;
- i) Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber energi alternatif dan mengurangi penggunaan karbon energi fosil dengan menggunakan alat tangkap yang tepat dan kapal nelayan;

- j) Mendorong praktik kerja yang baik dan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan domestik;
- k) Mengembangkan pedoman dan meningkatkan kapasitas otoritas terkait dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan konflik dengan para pemangku kepentingan lain dan dengan pengguna sumber daya lainnya;
- l) Menyelidiki potensi sumber daya perikanan yang kurang dimanfaatkan dan mempromosikan eksploitasi sumberdaya dengan cara pencegahan berdasarkan analisis informasi ilmiah terbaik yang tersedia;
- m) Meningkatkan program bersama ASEAN untuk lebih melindungi mata pencaharian produsen skala kecil dan untuk distribusi yang lebih adil dari manfaat yang diperoleh dari kedua intra dan extra daerah dalam perdagangan ikan dan produk perikanan;
- n) Menyesuaikan program yang ada untuk mempertimbangkan efek dari perubahan iklim, fokus pada program untuk (i) pengelolaan perikanan dan habitat, (ii) mengurangi kapasitas penangkapan dan memerangi penangkapan ilegal, (iii) memperkuat kelembagaan lokal; dan (iv) meningkatkan keselamatan di laut dan bidang prioritas lainnya;

- o) Mengembangkan indikator dan pelaporan langkah-langkah untuk menilai bagaimana tindakan dari program membangun ketahanan terhadap perubahan iklim.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan ikan dan produk perikanan

Upaya optimalisasi pemanfaatan ikan dan produk perikanan dalam rangka mendukung kerangka kerja AIFS untuk mewujudkan ketahanan pangan ASEAN pada tahun 2020 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:⁵³

- a) Memperkenalkan dan memberikan dukungan untuk pengembangan dan penerapan teknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan hasil tangkapan, mengurangi kerugian pasca panen, limbah dan bahan buangan dari aktifitas perdagangan dan perikanan skala kecil dan operasi pengolahan, melalui peningkatan pengolahan, pembangunan sarana dan prasarana, penyimpanan, distribusi dan pemasaran ikan dan produk perikanan;
- b) Meningkatkan produksi dan melestarikan keragaman produk ikan tradisional oleh produsen dalam membantu mengamankan pasokan yang stabil dari bahan baku berkualitas, memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan identitas produk, nilai gizi dan pemasaran;

⁵³http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/OCT10/APCAS-10-17_AFSIS.pdf, accessed December 25th 2012.

- c) Mengembangkan sistem terintegrasi dengan mekanisme yang diperlukan untuk mengesahkan atau memvalidasi informasi, untuk seluruh rantai pasokan, dan menetapkan peraturan dan penegakan skema sesuai dengan standar internasional. Menyelaraskan sistem pemeriksaan negara anggota dan memasukkan inspeksi pelabuhan yang diperkuat dalam proses sebagai sarana untuk meningkatkan sistem pemeriksaan;
- d) Memperkuat kualitas ikan dan sistem manajemen keselamatan yang mendukung kompetitif posisi produk ikan ASEAN di pasar dunia, termasuk menuju ISO / IEC 17025 sebagai akreditasi laboratorium pemeriksaan ikan nasional, memperkuat kapasitas dan analisis risiko dan kesetaraan kesepakatan seperti *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dan mempromosikan pelaksanaan kualitas dan sistem manajemen keselamatan di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah ASEAN;
- e) Mendorong lembaga kontrol yang relevan di semua tingkat dalam menerapkan undang-undang yang tepat dan terkoordinasi dalam kegiatan mengenai penanganan, pengolahan, distribusi, penyimpanan, pemasaran, kualitas dan keamanan produk ikan dan perikanan;
- f) Memajukan dan melaksanakan program-program pelatihan dan mengembangkan bahan pelatihan untuk meningkatkan

keterampilan teknis dan kompetensi personil di sektor publik dan swasta pada teknologi perikanan pasca panen dan sistem manajemen keselamatan makanan;

- g) Meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk mengembangkan insentif keuangan dan kredit mikro, dengan bantuan kelembagaan daerah dan nasional untuk pengembangan sektor perikanan yang bertanggung jawab dan perusahaan akuakultur serta kegiatan pembangunan yang akan mengoptimalkan sosio-ekonomi hasil perikanan dan keamanan pangan;
 - h) Mendorong praktik kerja yang baik dan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan domestik;
 - i) Mengembangkan standar dan pedoman untuk penanganan produk perikanan dan transportasi, desain dan konstruksi higienitas kapal, dan termasuk pelatihan penanganan ikan sebagai bagian dari persyaratan untuk penerbitan izin di semua tingkatan untuk kru kapal ikan, dan mendorong pekerja baru pekerja untuk memasuki industri perikanan.
- 4) Perdagangan ikan
- a) Memperkuat kerjasama antara Negara-negara Anggota untuk menerapkan standar internasional untuk perdagangan ikan dan produk perikanan di kawasan ASEAN;

- f) Membantu produsen skala kecil baik dari tangkapan ikan dan budidaya perikanan dalam mengamankan dan mempertahankan akses ke pasar di tingkat nasional, regional dan internasional, dan dalam proses mengembangkan sistem pemasaran yang tidak padat modal dan dapat diakses untuk produsen lokal;
 - g) Mendorong dan memberikan bimbingan untuk mengembangkan/meningkatkan branding produk perikanan yang menunjukkan sifat ramah lingkungan dan sosial yang dapat diterima dari produk ikan ASEAN (Misalnya satu komunitas satu produk perikanan), termasuk standar organik dan koordinasi persyaratan halal;
 - h) Mendorong penerapan standar internasional yang sesuai dan memperkuat relevansi dengan langkah-langkah program *Sanitary* dan *Phytosanitary* (SPS), Hambatan teknis dalam aktifitas perdagangan, serta peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran pada isu-isu perdagangan ikan, dan penyebaran informasi yang mengakui status perbedaan pembangunan di Negara-negara Anggota;
 - i) Memperkuat penilaian risiko dan produk perikanan dan budidaya, termasuk masalah keamanan pangan.
- 5) Perumusan kebijakan nasional dan internasional

Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan negara anggota dalam forum internasional dan komite teknis seperti Konvensi

Perdagangan *Internasional Endangered* di Spesies Satwa Liar dan Flora (CITES), *Codex Alimentarius Commission*, Makanan dan *Agriculture Organization* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), *Office International des Epizooties* (OIE), Regional Badan Perikanan (RFBs), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan mempromosikan kepentingan ASEAN, mengakui bahwa perikanan kebijakan yang relevan dengan wilayah ASEAN dan tingkat global.